

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA-P)**



**KECAMATAN HALONG
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

KECAMATAN HALONG

Alamat : Jalan Pembangunan Nomor 105 71666 Email : Kechalong1@gmail.com
IG : Kantorkecamatanhalong FB : Kantor Kecamatan Halong

KEPUTUSAN CAMAT HALONG NOMOR 41.A TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) KECAMATAN HALONG TAHUN 2023

CAMAT HALONG

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Penyusun;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Halong tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);
14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT HALONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) KECAMATAN HALONG TAHUN 2023
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2023 mempunyai tugas Menyusun Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Halong

Pada tanggal : 25 Mei 2023



RAHMADI, S.Sos., M.AP
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19810914 201001 1 009

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)
KECAMATAN HALONG TAHUN 2023**

NO	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
01	Rahmadi, S.Sos., M.AP NIP. 19810914 201001 1 009	Camat	Penanggung Jawab
02	Kastina, S.Ag., MA NIP. 19730827 200701 2 007	Sekretaris Kecamatan	Ketua
03	Heri Suharmani NIP. 19711027 199503 1 004	Kasubbag Perencanaan & Keuangan	Sekretaris
04	Muhammad, S.Pd.I NIP. 19720713 200701 1 015	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Anggota
05	Mili Yusmawati, S.Sos. NIP. 19801117 200604 2 024	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Anggota
06	Rukmini, S.Pd., MM NIP. 19690725 200701 2 019	Kasi Pelayanan Publik	Anggota
07	Taufikkurrahman, S.Sos. NIP. 19851008 201001 1 014	Kasi Pemerintahan Umum & Koordinasi Trantib	Anggota
08	Muhammad Subeli NIP. 19650607 198602 1 008	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	Anggota
09	Hardiansyah, S.Pd. NIP. 19750507 200904 1 002	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Anggota



CAMAT HALONG

RAHMADI, S.Sos., M.AP
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19810914 201001 1 009

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2023 dapat disusun.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2023, nantinya akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2023. Serta diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh seluruh Aparatur Kecamatan Halong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2023 ini masih belum sempurna, kritik dan saran untuk penyempurnaan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) ini tentunya sangat diharapkan untuk kemajuan di masa yang akan datang.

Halong, 17 Juli 2023

CAMAT HALONG



RAHMADI, S.Sos., M.AP
Pengatur Tingkat I (III/d)
NIP. 19810914 201001 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023	9
BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA	18
A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Perubahannya	18
B. Dampak Sosial Ekonomi	30
BAB IV PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) adalah Dokumen Perencanaan Perubahan yang memuat Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif Sub Kegiatan. Mendukung terwujudnya Good Governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan Tata Pengelolaan Pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (Result Oriented Government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik.

Kecamatan Halong merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) menjadi mutlak, yaitu menjadi pedoman di Lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan.

Selanjutnya, dari sisi dinamika Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian Target-Target RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, khususnya Target Indikator Kinerja Daerah pada Tahun 2023. Dengan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Balangan yang harus disesuaikan, serta untuk menyempurnakan

perencanaan agar bisa dilaksanakan dengan maksimal, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Kecamatan Halong Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2023 ini disusun untuk menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Halong, yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Perubahan Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong dimulai dari usulan setiap Seksi atau PPTK dan juga dari Sekretariat, kemudian menganalisis gambaran pelayanan Kecamatan Halong untuk menentukan isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan Review Hasil Evaluasi Rencana Kerja Murni SKPD yakni dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni Tahun 2023.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Halong menetapkan Sasaran Kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian terhadap suatu sasaran. Pencapaian IKU Kecamatan Halong sampai dengan Bulan Juni Tahun 2023 ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

**Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan
Halong sampai dengan Bulan Juni Tahun 2023**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	83	87,89	105,89%
Meningkatnya mandirian Desa Lingkup Kecamatan	Skor IDM	0,7043	0,7378*	104,76%

*Skor IDM Tahun 2022, untuk Skor IDM Tahun 2023 biasanya terbit di Bulan Agustus Tahun Berkenaan

Nilai IKM di atas diperoleh dari survey yang dilakukan Seksi Pelayanan Publik atas Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Halong, dengan jumlah responden sebanyak 25 orang untuk 1 (satu) semester. Sedangkan untuk Skor IDM diperoleh dari data isian terhadap quisioner yang diberikan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada seluruh desa dalam Wilayah Kecamatan Halong untuk 1 (satu) tahun. Skor IDM di atas, masih menggunakan Skor IDM Tahun 2022, hal ini dikarenakan Skor IDM untuk Tahun 2023 biasanya baru akan terbit pada Bulan Agustus tahun berkenaan.

Untuk Nilai IKM formula perhitungan yang dipakai adalah sebagai berikut :

Formula Perhitungan		
Total Nilai IKM yang dicapai	X	100%
Target IKM		

Adapun untuk Skor IDM, sampai saat ini Kecamatan Halong hanya diberikan hasil dari isian data terhadap quisioner yang diberikan kepada seluruh desa pada Wilayah Kecamatan Halong, terkait formula perhitungan maka hal tersebut tidak diketahui.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Nilai IKM tersebut adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 138.256.400,- dan Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Juni 2023 sebesar Rp. 63.180.000,- atau 45,70%. Sedangkan Target Kinerja adalah Nilai IKM sebesar 83 dengan realisasi sebesar 87,89 atau dengan capaian sebesar 105,89%. Sedangkan untuk mendukung Pencapaian Skor IDM, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 111.900.000,- dan Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Juni 2023 sebesar Rp. 51.220.000,- atau 45,77%. Sedangkan Target Kinerjanya adalah Skor IDM sebesar 0,7043 dengan realisasi sebesar 0,7378 atau dengan capaian sebesar 104,76%.

B. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);

13. Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021;
14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25).

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

1. Mewujudkan Sinergitas dan Singkronisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Pengalokasian Anggaran secara Efektifitas dan Efisiensi sehingga menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh aparatur pada Kecamatan Halong dalam melaksanakan tugasnya, sehingga Sasaran dan Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk.
3. Memberikan informasi kepada Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) tentang Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong.
4. Mempermudah Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2023.
5. Memberikan pedoman dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada masing-masing Seksi dan Sub Bagian pada Lingkungan Kecamatan Halong.

b. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong Tahun 2023 ini adalah, sebagai Penyempurnaan Rencana Kerja Kecamatan Halong Tahun 2023. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Halong terdiri dari 4 (empat) Bab dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong diukur berdasarkan target yang dibuat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka Pengumpulan Data Kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Capaian Kinerja Kecamatan Halong Tahun 2023, sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Halong 2021-2026. Hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan Target Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Kecamatan Halong pada Tahun 2023 melaksanakan 6 Program, 11 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka terealisasinya Sasaran Strategis.

Berdasarkan hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II, maka untuk Capaian Kinerjanya adalah 60,91%, sedangkan Realisasi Anggarannya adalah sebesar 46,96%. Uraian selengkapnya terkait Capaian Kinerja per indikator sampai dengan Bulan Juni 2023, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 1 (satu) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 2 (dua)

dokumen. Hal ini dikarenakan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sudah selesai disusun, sedangkan untuk Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 maupun masih dalam Tahap Penyusunan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 11.000.000,- atau sebesar 45,01%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 24.438.200,-

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 0% atau masih belum ada dokumen yang disusun dari Target Kinerja sebanyak 2 (dua) dokumen. Hal ini dikarenakan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2024 belum diinput pada Aplikasi SIPD-RI, begitupun dengan Dokumen RKA-SKPD Perubahan Tahun 2023 belum diinput pada Aplikasi SIPD. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0,00%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 271.400,-

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100% atau sebanyak 2 (dua) laporan, dari Target Kinerja sebanyak 2 (dua) laporan. Hal ini dikarenakan Laporan Pengukuran Kinerja (LKIP) yang disampaikan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) yang disampaikan ke Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan sudah selesai disusun dan ditandatangani Camat. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 107.300,- atau sebesar 45,05%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 238.200,-.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 91,30% atau sebanyak 21 Orang/Bulan dari Target Kinerja sebanyak 23 Orang/Bulan, hal ini dikarenakan ada 1 (satu) orang ASN yang mutasi ke SKPD lain dan 1 (satu) orang memasuki Masa Pensiun. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 1.664.785.828,- atau sebesar 54,14%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.211.298.320,-.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 2 (dua) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 4 (empat) dokumen. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 61.932.726,- atau sebesar 45,35%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 136.556.000,-.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 66,6% atau sebanyak 2 (dua) paket dari Target Kinerja sebanyak 3 (tiga) paket. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 2.446.700,- atau sebesar 36,35% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.731.800,-
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) laporan dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) laporan. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 64.929.404,- atau sebesar 55,76% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 116.436.000,-

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) laporan dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) laporan. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 9.879.601,- atau sebesar 34,30% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 28.805.000,-

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) laporan dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) laporan. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 46.406.200,- atau sebesar 53,85% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 86.178.400,-

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100% atau sebanyak 12 (dua belas) unit dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) unit. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 14.932.844,- atau sebesar 33,11% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 45.102.700,-

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100% atau sebanyak 3 (tiga) unit dari Target Kinerja sebanyak 3

(tiga) unit. Sedangkan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 13.600.000,- atau sebesar 48,30% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 28.159.000,-

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) laporan dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) laporan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 63.180.000,- atau sebesar 45,70%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 138.256.400,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) laporan dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) laporan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 321.500.000,-
 - b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100% atau sebanyak 35 Keluarga dari Target Kinerja sebanyak 35 Keluarga. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 31.895.910,- atau sebesar 42,53%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 50% atau sebanyak 6 (enam) laporan dari Target Kinerja sebanyak 12 (dua belas) laporan. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.886.400,-.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 40% atau sebanyak 2 (dua) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 5 (lima) dokumen. Hal ini dikarenakan baru 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan yaitu Peringatan Hari Jadi Kabupaten Balangan dan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 5.700.000,- atau sebesar 3,41%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 166.921.800,-.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Capaian Kinerjanya adalah sebesar 0% atau sebanyak 0 (nol) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 2 (dua)

dokumen. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 22.253.750,- atau sebesar 55,66%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 39.984.400,-.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 59,38% atau sebanyak 57 dokumen dari Target Kinerja sebanyak 96 dokumen. 57 dokumen dimaksud adalah 24 Dokumen Evaluasi Rancangan APBDes dan 24 Dokumen Rekomendasi Penyaluran ADD/DDs Tahap I. Untuk Rekomendasi ADD/DDs Tahap II baru 9 (sembilan) desa yang mengajukan sampai dengan Akhir Bulan Juni 2023. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 51.220.000,- atau sebesar 45,77%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 111.900.000,-.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100% atau 1 (satu) dokumen dari Target Kinerja sebanyak 1 (satu) dokumen. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 8.050.600,- atau sebesar 92,57%, dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.696.400,-.

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2023 sebagaimana penjelasan di atas, dapat juga dilihat pada tabel berikut ini :

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

KECAMATAN HALONG

TRIWULAN II TAHUN 2023

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8				9		10		11=10/7x100%		12=6+10		13=12/5x100%	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kecamatan Halong	75.4 Nilai	20.684.630.350	71.63 Nilai	2.951.718.160	68.2 Nilai	3.547.659.020	71,63 Nilai	720.034.493	70,15 Nilai	1.890.020.603	70,15 Nilai	1.890.020.603	102,86	53,28	70,15 Nilai	1.890.020.603	93,04	9,14		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	111.377.450	100%	44.852.000	100%	24.947.800	33,33%	2.200.000	33,33%	11.107.300	33,33%	11.107.300	33,33	44,52	33,33 %	11.107.300	33,33	9,97		
1.	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	31.834.000	2 Dokumen	3.956.000	2 Dokumen	24.438.200	0 Dokumen	2.200.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	11.000.000	50	45,01	1 Dokumen	11.000.000	8,33	34,55		
2.	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	16.768.450	2 Dokumen	2.221.000	2 Dokumen	271.400	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0		
3.	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	62.775.000	2 Laporan	38.675.000	2 Laporan	238.200	2 Laporan	0	2 Laporan	107.300	2 Laporan	107.300	100	45,05	2 Laporan	107.300	20	0,17		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan yang Berlaku	72 Bulan	18.666.820.900	12 Bulan	2.542.911.488	12 Bulan	3.211.298.320	3 Bulan	676.831.771	6 Bulan	1.726.718.554	6 Bulan	1.726.718.554	50	53,77	6 Bulan	1.726.718.554	8,33	9,25		
4.	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang / Bulan	17.964.802.900	23 Orang / Bulan	2.449.866.100	23 Orang / Bulan	3.074.742.320	22 Orang / Bulan	664.254.196	21 Orang / Bulan	1.664.785.828	21 Orang / Bulan	1.664.785.828	91,3	54,14	21 Orang / Bulan	1.664.785.828	15,22	9,27		
5.	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	702.018.000	4 Dokumen	93.045.388	4 Dokumen	136.556.000	1 Dokumen	12.577.575	2 Dokumen	61.932.726	2 Dokumen	61.932.726	50	45,35	2 Dokumen	61.932.726	8,33	8,82		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	72 Bulan	810.665.000	12 Bulan	187.419.356	12 Bulan	123.167.800	3 Bulan	12.411.700	6 Bulan	67.376.104	6 Bulan	67.376.104	50	54,7	6 Bulan	67.376.104	8,33	8,31		
6.	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket	58.846.000	3 Paket	5.730.800	3 Paket	6.731.800	1 Paket	1.196.700	2 Paket	2.446.700	2 Paket	2.446.700	66,67	36,35	2 Paket	2.446.700	11,11	4,16		
7.	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	751.819.000	12 Laporan	181.688.556	12 Laporan	116.436.000	3 Laporan	11.215.000	6 Laporan	64.929.404	6 Laporan	64.929.404	50	55,76	6 Laporan	64.929.404	8,33	8,64		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	698.629.000	12 Bulan	103.331.699	12 Bulan	114.983.400	3 Bulan	23.341.008	6 Bulan	56.285.801	6 Bulan	56.285.801	50	48,95	6 Bulan	56.285.801	8,33	8,06		
8.	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	217.315.000	12 Laporan	17.930.699	12 Laporan	28.805.000	3 Laporan	3.466.108	6 Laporan	9.879.601	6 Laporan	9.879.601	50	34,3	6 Laporan	9.879.601	8,33	4,55		
9.	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	481.314.000	12 Laporan	85.401.000	12 Laporan	86.178.400	3 Laporan	19.874.900	6 Laporan	46.406.200	6 Laporan	46.406.200	50	53,85	6 Laporan	46.406.200	8,33	9,64		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	397.138.000	12 Bulan	73.203.617	12 Bulan	73.261.700	3 Bulan	5.250.014	6 Bulan	28.532.844	6 Bulan	28.532.844	50	38,95	6 Bulan	28.532.844	8,33	7,18		
10.	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	73 Unit	291.640.000	11 Unit	55.603.617	12 Unit	45.102.700	12 Unit	1.330.014	12 Unit	14.932.844	12 Unit	14.932.844	100	33,11	12 Unit	14.932.844	16,44	5,12		
11.	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	105.498.000	3 Unit	17.600.000	3 Unit	28.159.000	3 Unit	3.920.000	3 Unit	13.600.000	3 Unit	13.600.000	100	48,3	3 Unit	13.600.000	16,67	12,89		
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase PATEN yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	732.822.000	100%	134.795.000	100%	138.256.400	100%	12.100.000	100%	63.180.000	100%	63.180.000	100	45,7	100%	63.180.000	100	8,62		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PATEN yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan	100%	732.822.000	100%	134.795.000	100%	138.256.400	100%	12.100.000	100%	63.180.000	100%	63.180.000	100	45,7	100%	63.180.000	100	8,62		
12.	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	72 Laporan	732.822.000	12 Laporan	134.795.000	12 Laporan	138.256.400	3 Laporan	12.100.000	6 Laporan	63.180.000	6 Laporan	63.180.000	50	45,7	6 Laporan	63.180.000	8,33	8,62		

3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Musrenbang Desa	100%	1.773.200.000	100%	327.925.000	100%	396.500.000	25%	8.830.000	50%	31.895.910	50%	31.895.910	50	8,04	50%	31.895.910	50	1,8	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	1.698.200.000	100%	327.925.000	100%	321.500.000	25%	0	50%	0	50%	0	50	0	50%	0	50	0	
13.	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	1.698.200.000	12 Laporan	327.925.000	12 Laporan	321.500.000	3 Laporan	0	6 Laporan	0	6 Laporan	0	50	0	6 Laporan	0	10	0	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	75.000.000	0%	0	100%	75.000.000	100%	8.830.000	100%	31.895.910	100%	31.895.910	100	42,53	100%	31.895.910	100	42,53	
14.	7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	35 Keluarga	75.000.000	0 Keluarga	0	35 Keluarga	75.000.000	35 Keluarga	8.830.000	35 Keluarga	31.895.910	35 Keluarga	31.895.910	100	42,53	35 Keluarga	31.895.910	100	42,53	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Ketertaman dan Ketertiban dengan Lintas Sektor	100%	53.115.000	100%	8.684.000	100%	2.886.400	100%	0	100%	0	100%	0	100	0	100%	0	100	0	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Keteribatan Umum	Jumlah Waktu Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60 Bulan	53.115.000	12 Bulan	8.684.000	12 Bulan	2.886.400	3 Bulan	0	6 Bulan	0	6 Bulan	0	50	0	6 Bulan	0	10	0	
15.	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	53.115.000	12 Laporan	8.684.000	12 Laporan	2.886.400	3 Laporan	0	6 Laporan	0	6 Laporan	0	50	0	6 Laporan	0	10	0	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	100%	993.890.000	100%	149.110.000	100%	166.921.800	20%	5.500.000	40%	5.700.000	40%	5.700.000	40	3,41	40%	5.700.000	40	0,57	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	100%	993.890.000	100%	149.110.000	100%	166.921.800	20%	5.500.000	40%	5.700.000	40%	5.700.000	40	3,41	40%	5.700.000	40	0,57	
16.	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	32 Dokumen	993.890.000	4 Dokumen	149.110.000	5 Dokumen	166.921.800	1 Dokumen	5.500.000	2 Dokumen	5.700.000	2 Dokumen	5.700.000	40	3,41	2 Dokumen	5.700.000	6,25	0,57	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa	100%	799.279.400	100%	95.556.600	100%	160.580.800	100%	19.050.000	100%	81.523.750	100%	81.523.750	100	50,77	100%	81.523.750	100	10,2	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa	100%	799.279.400	100%	95.556.600	100%	160.580.800	100%	19.050.000	100%	81.523.750	100%	81.523.750	100	50,77	100%	81.523.750	100	10,2	
17.	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24 Dokumen	354.984.400	0 Dokumen	0	2 Dokumen	39.984.400	0 Dokumen	1.100.000	0 Dokumen	22.253.750	0 Dokumen	22.253.750	0	55,66	0 Dokumen	22.253.750	0	6,27	
18.	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	393.885.000	3 Dokumen	88.020.000	96 Dokumen	111.900.000	48 Dokumen	9.900.000	57 Dokumen	51.220.000	57 Dokumen	51.220.000	59,38	45,77	57 Dokumen	51.220.000	316,67	13	
19.	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11 Dokumen	50.410.000	2 Dokumen	7.536.600	1 Dokumen	8.696.400	1 Dokumen	8.050.000	1 Dokumen	8.050.000	1 Dokumen	8.050.000	100	92,57	1 Dokumen	8.050.000	9,09	15,97	
															Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	61,10	33,35					
															Jumlah Anggaran dari seluruh Program	4.412.804.420		765.514.493		2.072.320.263		2.072.320.263

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM
PERUBAHAN RENCANA KERJA

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Perubahannya

Sebagaimana telah disampaikan pada Bab II di atas, bahwa dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Halong melaksanakan 6 Program, 11 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan. Pada Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) ada tambahan 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Penambahan 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan Semangat Kerja Aparatur Kecamatan Halong, sehingga target-target yang telah ditetapkan baik itu Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja dapat tercapai.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN HALONG TAHUN 2023**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Alasan Perubahan
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP) KECAMATAN HALONG	68,20%	3.547.659.020	68,20%	4.220.480.020	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen 2 Laporan	24.947.800	4 Dokumen 2 Laporan	24.947.800	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	24.438.200,00	2 Dokumen	31.438.200,00	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	271.400,00	2 Dokumen	271.400,00	
03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	238.200,00	2 Laporan	238.200,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan yang Berlaku	12 Bulan	3.211.298.320	12 Bulan	3.427.960.370	

04	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	04	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/Bulan	3.074.742.320	22 Orang/Bulan	3.257.704.370	
05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	136.556.000	4 Dokumen	170.256.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	123.167.800	12 Bulan	347.401.200	
06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	6.731.800	3 Paket	16.106.200	
07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	116.436.000	12 Laporan	331.295.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	6 Bulan	156.201.200	
		08	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	2 Unit	40.000.000	
		09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	12 Unit	76.201.200	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	114.983.400	12 Bulan	135.378.400	

08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.805.000	12 Laporan	32.900.000	
09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	86.178.400	12 Laporan	102.478.400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	73.261.700	12 Bulan	121.591.050	
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	45.102.700	12 Unit	86.452.050	
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	28.159.000	3 Unit	35.139.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PATEN YANG TERLAYANI SESUAI STANDAR PELAYANAN	100%	138.256.400	100%	138.256.400	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PATEN yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	138.256.400	100%	173.156.400	
12	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	14	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	138.256.400	12 Laporan	173.156.400	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE FASILITASI PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA	100%	346.500.000	100%	116.450.000	

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	321.500.000	100%	-	
13	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	321.500.000	12 Laporan	-	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	75.000.000	100%	116.450.000	
14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas	16	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	35 Keluarga	75.000.000	35 Keluarga	116.450.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI SINERGITAS DAN HARMONISASI URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DENGAN LINTAS SEKTOR	100%	2.886.400	100%	2.886.400	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Waktu Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	2.886.400	100%	2.886.400	

15	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2.886.400	12 Laporan	2.886.400	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN DESA	100%	148.437.800	100%	216.528.900	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	100%	166.921.800	100%	216.528.900	
16	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	18	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	5 Dokumen	166.921.800	4 Dokumen	216.528.900	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET DESA	100%	120.596.400	100%	192.080.800	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa	100%	160.580.800	100%	192.080.800	
17	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	39.984.400	2 Dokumen	39.984.400	

18	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	96 Dokumen	111.900.000	96 Dokumen	143.400.000	
19	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	21	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	8.696.400	1 Dokumen	8.696.400	
						4.412.804.420		4.921.582.520	

Terkait adanya Penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan (sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas), maka untuk lebih jelasnya dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 24.438.200,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 31.438.200,- akibat adanya Penambahan Besaran dan Volume Honorarium THL.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.074.742.320,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 182.962.050,- akibat adanya Rencana Kenaikan Tunjangan Penghasilan Penghasilan Pegawai (TPP).

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 136.556.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 33.700.000,- akibat adanya Penambahan Besaran dan Volume Honorarium THL.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.731.800,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.374.400,- akibat adanya Penambahan Belanja Cetak dan Penggandaan.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 116.436.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 214.859.000,- dengan tujuan untuk Peningkatan Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub Kegiatan ini baru dimasukkan pada Rencana Kerja Perubahan (Renja-P), adapun maksud dan tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan Mobilitas Aparatur khususnya ketika melaksanakan kunjungan ke daerah pegunungan.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan ini baru dimasukkan pada Rencana Kerja Perubahan (Renja-P), hal ini disebabkan masih kurangnya Sarana Pendukung Kerja, sehingga nantinya diharapkan dapat lebih meningkatkan Semangat Kerja.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 28.805.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.095.000,- akibat adanya peningkatan pemakaian air.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 86.178.400,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 16.300.000,- akibat adanya Penambahan Besaran dan Volume Honorarium THL.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 45.102.700,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 41.349.350,- untuk menambah Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Mobil Dinas serta Bahan Bakar Pemadam Kebakaran.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pagu Anggaran Murni untuk Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 28.159.000,-, selanjutnya ada

Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.980.000,- akibat adanya Penambahan Besaran dan Volume Honorarium THL.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 138.256.400,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 34.900.000,- akibat adanya Penambahan Besaran dan Volume Honorarium THL.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 321.500.000,-, selanjutnya ada Keseluruhan Pagu Anggaran dikurangi keseluruhan. Hal diakibatkan Tunjangan Kinerja Ketua Rukun Tetangga (RT) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa. Uang Pembinaan Juara Lomba Desa tidak jadi direalisasikan, dikarenakan tidak adanya Pemerintahan Desa yang bersedia mengikuti Lomba Desa Tingkat Kabupaten.

b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 75.000.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 41.450.000,- dikarenakan bertambahnya kegiatan pada Sub Kegiatan tersebut.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 166.921.800,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 49.607.100,- akibat adanya Penambahan Jumlah Peserta Paskibra serta Peserta dan Kafilah MTQ.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Pagu Anggaran Murni Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 111.900.000,-, selanjutnya ada Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 31.500.000,- akibat adanya Penambahan Besaran dan Volume Honorarium THL.

B. Analisis Dampak Sosial Ekonomi

Dengan dilaksanakannya seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel di atas, diharapkan akan berdampak secara Sosial Ekonomi terhadap Masyarakat Kecamatan Halong. Khususnya untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi pengampu dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Halong. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Halong sebagaimana tercantum dalam Dokumen Renstra 2021-2026 adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** dengan Indikator Kinerja adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan **Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan** dengan Indikator Kinerja yaitu Skor Indeks Desa Membangun (IDM). Adapun Dampak Sosial Ekonomi yang diharapkan dapat dirasakan oleh Masyarakat Kecamatan Halong terkait Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi pengampu dari Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah sebagai berikut :

- a. Secara Sosial, dengan semakin **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** khususnya untuk Pelayanan Non Perizinan, maka hak-hak masyarakat dalam hal Administrasi Kependudukan telah terpenuhi. Kemudian dari sisi ekonomi, Peningkatan Pelayanan Perizinan diharapkan akan bisa lebih menggerakkan Sektor UMKM.
- b. Dengan semakin **Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan**, maka bukan hanya Sosial Ekonomi Masyarakat saja yang semakin meningkat, tapi juga dari sisi Ketahanan Lingkungan. Karena sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi Indikator Kinerja **Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan** adalah Skor Indeks Desa Membangun (IDM). Sedangkan Indeks Desa Membangun (IDM) sendiri dibentuk oleh 3 Indeks, yaitu

Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan
Indeks Ketahanan Lingkungan.

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong Tahun 2023, yang selanjutnya akan dibarengi dengan perubahan produk turunannya yaitu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Maka diharapkan dampaknya akan dirasakan, yaitu dengan semakin meningkatnya Semangat Kerja seluruh Aparatur Kecamatan Halong. Sehingga target-target yang telah ditetapkan, baik itu target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun pada Indikator Kinerja.

Halong, 17 Juli 2023



CAMAT HALONG

Rahmadi

RAHMADI, S.Sos., M.AP
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19810914 201001 1 009